



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **MOH. SALMAN, S.STP., M.Si.**

Jabatan : Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja

Selanjutnya disebut **Pihak Kesatu**

Nama : **INDRA FAWZY, S.IP., M.Si.**

Jabatan : Kepala Satuan Polisi Pamong Praja

Selaku atasan Pihak Kesatu, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Kesatu berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Malili, 3 Januari 2022

Pihak Kedua,

INDRA FAWZY, S.IP., M.Si.

Pihak Kesatu,

MOH. SALMAN, S.STP., M.Si

**LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA
SEKRETARIS**

UNIT ORGANISASI

: SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

TAHUN ANGGARAN

: 2022

NO	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran	- Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100%
1)	Terlaksananya dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi tepat waktu	- Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi tepat waktu	100%
2)	Terselenggaranya administrasi keuangan dengan baik	- Persentase administrasi keuangan yang terselenggara dengan baik	100%
3)	Teradministrasikannya BMD Perangkat Daerah sesuai standar	- Persentase BMD yang Diadministrasi sesuai standar	100%
4)	Terlaksananya administrasi kepegawaian Perangkat Daerah dengan baik	- Persentase rata-rata capaian kinerja administrasi kepegawaian Perangkat Daerah	100%
5)	Terlaksananya administrasi umum Perangkat Daerah dengan baik	- Persentase rata-rata capaian kinerja administrasi umum	100%
6)	Terlaksananya jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah	- Persentase rata-rata capaian kinerja penunjang urusan Pemerintah Daerah	100%
7)	Terpeliharanya Barang Milik Daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah dengan baik	- Persentase Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah yang terpelihara dengan baik	100%

PROGRAM

1 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

ANGGARAN
Rp 5.185.891.262

KETERANGAN

APBD

KEGIATAN

1) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Rp 76.375.175

APBD

SUB KEGIATAN

1 Penyusunan Dokumen perencanaan perangkat daerah

Rp 28.721.125

APBD

2 Koordinasi dan penyusunan dokumen n RKA-SKPD

Rp 2.735.980

APBD

3	Koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD	Rp	2.904.150	APBD
4	Koordinasi Dan penyusunan DPA-SKPD	Rp	2.265.980	APBD
5	Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Rp	2.535.980	APBD
6	Evaluasi Kinerja Pearnngkat Daerah	Rp	37.211.960	APBD
KEGIATAN				
2)	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp	4.324.496.133	APBD
SUB KEGIATAN				
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp	4.248.482.463	APBD
2	Penyediaan Administrasi pelaksanaan Tugas ASN	Rp	21.960.000	APBD
3	Pelaksanaan Penatausahaan dan pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Rp	17.446.350	APBD
4	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir Tahun SKPD	Rp	17.993.760	APBD
5	Pengelolaan dan penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan	Rp	2.574.960	APBD
6	koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/Semesteran SKPD	Rp	16.038.600	APBD
KEGIATAN				
3)	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Rp	30.289.006	APBD
SUB KEGIATAN				
1	Penyusunan perencanaan kebutuhan barang milik Daerah SKPD	Rp	5.778.980	APBD
2	Rekonsiliasi dan penyusunan laporan barang milik daerah pada SKPD	Rp	9.890.980	APBD
3	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Rp	14.619.046	APBD
KEGIATAN				
4)	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp	121.657.098	APBD
SUB KEGIATAN				
1	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Rp	7.629.688	APBD

2	Monitoring, evaluasi dan penilaian kinerja pegawai	Rp	17.847.410	APBD
3	Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	Rp	55.650.000	APBD
4	sosialisasi peraturan Perundang-undangan	Rp	7.250.000	APBD
5	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Rp	33.280.000	APBD
KEGIATAN				
5)	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp	300.229.450	APBD
SUB KEGIATAN				
1	Penyediaan Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Rp	7.196.100	APBD
2	penyediaan peralatan rumah tangga	Rp	10.178.000	APBD
3	penyediaan bahan logistik kantor	Rp	5.634.000	APBD
4	penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Rp	11.430.000	APBD
5	penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Rp	7.800.000	APBD
6	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Rp	9.700.000	APBD
7	penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Rp	248.291.350	APBD
KEGIATAN				
6)	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp	107.409.400	APBD
SUB KEGIATAN				
1	Penyediaan jasa Surat Menyurat	Rp	4.926.400	APBD
2	Penyediaan Jasa komunikasi, Sumber daya air dan listrik	Rp	72.483.000	APBD
3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp	30.000.000	APBD
KEGIATAN				
7)	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp	225.435.000	APBD

SUB KEGIATAN

1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas	Rp	15.100.000	APBD
2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan , biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Rp	119.600.000	APBD
3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	Rp	59.460.000	APBD
4	Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Rp	16.875.000	APBD
5	Pemeliharaan / rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Rp	14.400.000	APBD

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA



INDRA FAWZY, S.IP., M.Si.
Pangkat: Pembina Utama Muda
NIP. 19701103 199003 1 002

Mallii, 3 Januari 2022

SEKRETARIS SATPOL PP



MOH. SALMAN, S.STP., M.Si.
Pangkat: Pembina Tk.I
NIP. 19800525 199912 1 002



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **YASRUDDIN, S.Sos.**

Jabatan : Kepala Bidang Sumber Daya Manusia dan Sarana
Prasarana Satuan Polisi Pamong Praja

Selanjutnya disebut **Pihak Kesatu**

Nama : **INDRA FAWZY, S.IP., M.Si.**

Jabatan : Kepala Satuan Polisi Pamong Praja

Selaku atasan Pihak Kesatu, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Kesatu berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

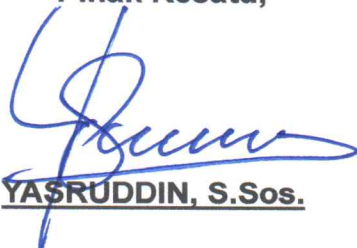
Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Malili, 3 Januari 2022

Pihak Kedua,


INDRA FAWZY, S.IP., M.Si.

Pihak Kesatu,


YASRUDDIN, S.Sos.

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA
KEPALA BIDANG SUMBER DAYA MANUSIA DAN SARANA PRASARANA
UNIT ORGANISASI : SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
TAHUN ANGGARAN : 2022

NO	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan Ketenteraman dan ketertiban umum sesuai standar pelayanan Minimal	- Persentase Pemenuhan Standar Teknis dan Mutu Pelayanan dasar SPM Bidang Ketenteraman dan ketertiban Umum - Persentase Warga Negara yang memperoleh Layanan Akibat dari Pengakuan Hukum Perda dan Perkada	66,99%
1	Tertanganinya Gangguan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	- Persentase SDM Aparatur terlatih	40,61%
		- Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Minimal	23,00%
		- Jumlah Aparatur Satpol PP yang mengikuti pelatihan - peningkatan Kapasitas	216 Orang
		- Jumlah Kegiatan pelatihan peningkatan kapasitas SDM Satpol PP Yang dilaksanakan	5 Kegiatan
		- Jumlah kegiatan Peningkatan kapasitas SDM Satgas - Linmas Kabupaten dan kecamatan yang dilaksanakan	1 Kegiatan
1)	Meningkatnya kompetensi SDM aparaturn Polisi Pamong Praja	- Jumlah Polisi Pamong Paraaja yang mengikuti diklat kompetensi	10 Orang
		- Jumlah Satgas Linmas Kabupaten dan kecamatan yang mengikuti pelatihan	128 Orang

2)	terlaksananya kerjasama antar lembaga dan kemitraan dalam teknik pencegahan dan penanganan gangguan K3	- Jumlah kerjasama Penyelenggaraan Tranitibum dan penegakan Perda yag dilaksanakan	2 Kegiatan
3)	Terpenuhiya dan terpeliharanya sarana dan prasarana Tranitibum sesuai standar	- Jumlah Gedung Posko Tranitibum Yang diadakan	0 Unit
		- Jumlah Kendaraan operasional yang diadakan	2 Unit
		- Jumlah Perlengkapan Operasional yang diadakan	84 unit
		- Jumlah Sarana dan Prasarana ketenteraman dan ketertiban Umum yang dipelihara	55 unit
4)	Tersedianya SOP ketenteraman dan ketertiban umum sebagai pedoman	Jumlah Dokumen SOP Ketenteraman dan ketertiban umum yang disusun/dimuktahikan	10 Dokumen
5)	Tersedianya layanan dalam rangka dampak penegakan Peaturan Daerah Dan Perkada	- Jumlah Layanan ganti rugi kerusakan barang/aset akibat terkena dampak penegakan peda/perkada - Jumlah layanan pengobatan cidera akibat terkena dampak penegakan peda perkara	5 unit 5 Orang
2	Meningkatnya Kompetensi PPNS	- Persentase PPNS yang berkomptoten	75,00%
1	Terlaksananya pengembangan kapasitas PPNS	- Jumlah PPNS yang mengikuti diklat PPNS	2 Orang
		- Jumlah PPNS yang mengikuti Diklat pengembangan PPNS	3 Orang
		- Jumlah Rakor PPNS yang dilaksanakan	4 Kali

PROGRAM

1 Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

ANGGARAN

Rp 566.724.269

KETERANGAN

APBD

KEGIATAN

- 1) Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota

Rp 527.100.000

APBD

SUB KEGIATAN

- 1 Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan perlindungan masyarakat termasuk dalam pelaksanaan tugas
- 2 Kerjasama antar lembaga dan kemitraan dalam teknik pencegahan dan penanganan gangguan ketenteraman dan

Rp 278.515.000

APBD

Rp 24.760.000

APBD

- 3 Pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana ketenteraman dan ketertiban
- 4 Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman masyarakat
- 5 Penyediaan Layanan dalam rangka dampak penegakan peraturan daerah dan perkotaan

Rp 211.795.000

APBD

Rp 4.370.000

APBD

Rp 7.660.000

APBD

KEGIATAN

- 2) Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota

Rp 39.624.269

APBD

SUB KEGIATAN

- 1 Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS

Rp 39.624.269

APBD

Malili, 3 Januari 2022

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA



INDRA FAWZY, S.I.P., M.Si.
Pangkat: Pembina Utama Muda
NIP. 197011031990031002

KEPALA BIDANG SUMBER DAYA APARATUR DAN SARANA PRASARANA



YASRUDDIN, S.Sos
Pangkat: Penata,
NIP. 198007032008011007



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **NI KADEK RINHA WATY, SE.**
Jabatan : Kepala Bidang Penegakan Peraturan Daerah Satuan
Polisi Pamong Praja

Selanjutnya disebut **Pihak Kesatu**

Nama : **INDRA FAWZY, S.IP., M.Si.**
Jabatan : Kepala Satuan Polisi Pamong Praja

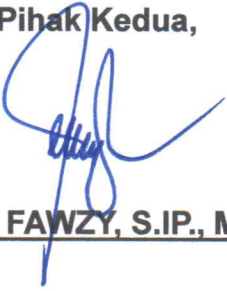
Selaku atasan Pihak Kesatu, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Kesatu berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Malili, 3 Januari 2022

Pihak Kedua,


INDRA FAWZY, S.IP., M.Si.

Pihak Kesatu,


NI KADEK RINHA WATY, SE.

UNIT ORGANISASI
TAHUN ANGGARAN

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA
KEPALA BIDANG PENEGAKAN PERATURAN DAERAH
: SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
: 2022

NO	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan Ketenteraman dan ketertiban umum sesuai standar pelayanan Minimal	- Persentase penurunan pelanggaran perda dan perkada	9.10 %
		- Persentase Penegakan perda dan perkada	100%
		- Persentase perda dan perkada yang ditegakkan	100%
		- Jumlah Sosialisasi pengendalian peredaran rokok ilegal yang dilaksanakan	11 kali
2	Terlaksananya Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota	- Jumlah Sosialisasi Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati Yang dilaksanakan	25 kali
		- Jumlah Warga Negara yang memperoleh sosialisasi perda/perkada	1460 orang
		- Jumlah Pengawasan kawasan tanpa rokok(KTR) yang dilaksanakan	20 kali
		- Jumlah Pengawasan peredaran rokok ilegal yang dilaksanakan	11 kali
3	Terlaksananya pengawasan atas kepatuhan terhadap pelaksanaan perda dan perkada	- Jumlah Pengawasan Potensi Pelanggaran Pelaksanaan perda dan perkada yang dilaksanakan	20 Kali
		- Jumlah pelanggaran kawasan tanpa rokok yang tertangani	15 kali
		- Jumlah Pelanggaran Perda/Perkada yang tertangani	50 kasus

PROGRAM
Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
KEGIATAN
1 Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/kota dan Peraturan Bupati Wali Kota

ANGGARAN
Rp 287.140.184
Rp 287.140.184

KETERANGAN
APBD
APBD



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **IBRAHIM YAKUB, S.Hut.**

Jabatan : Kepala Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan
Perlindungan Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja

Selanjutnya disebut **Pihak Kesatu**

Nama : **INDRA FAWZY, S.IP., M.Si.**

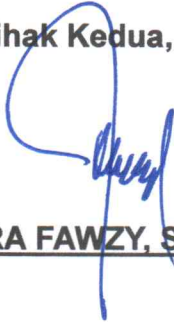
Jabatan : Kepala Satuan Polisi Pamong Praja

Selaku atasan Pihak Kesatu, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Kesatu berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

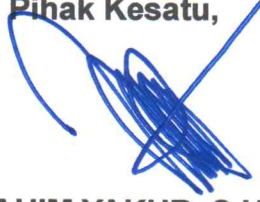
Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,


INDRA FAWZY, S.IP., M.Si.

Malili, 3 Januari 2022

Pihak Kesatu,


IBRAHIM YAKUB, S.Hut.

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA

KEPALA BIDANG KETENTERAMAN, KETERTIBAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

UNIT ORGANISASI

: SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

TAHUN ANGGARAN

: 2022

NO	SASARAN KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan Ketenteraman dan ketertiban umum sesuai standar pelayanan Minimal	Persentase Penurunan gangguan ketenteraman dan Ketertiban Umum Persentase Gangguan ketenteraman dan ketertiban Umum yang dapat diselesaikan	9.10 % 100%
1)	Tertanganinya Gangguan Ketenteraman dan ketertiban Umum	- Persentase Tertib Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang ditangani (Persen) - Persentase Satlinmas Desa/kelurahan yang aktif - Jumlah Operasi Deteksi dini dan cegah dini yang dilaksanakan - Jumlah operasi Patroli Ketenteraman dan ketertiban Umum - Jumlah Operasi Pembinaan dan penyuluhan ketenteraman dan ketertiban umum yang dilaksanakan - Jumlah Pengamanan Kegiatan Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat yang dilaksanakan - Jumlah Pengamanan Pejabat dan aset Daerah Yang dilaksanakan - Jumlah Pengawasan Pejabat dan Tamu daerah (VIP/VIP) yang dilaksanakan - Jumlah Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Yang upahnya dibayarkan	100% 8,59% 264 Kali 4015 Kali 1144 kali 1144 kali 1144 kali 365 Kali 110 Kali 216 Orang

2)	Tertanganinya Pelanggaran K3 dan Unjuk rasa serta kerusuhan massa	- Jumlah Penertiban gangguan/pelanggaran ketenteraman dan ketertiban umum yang dilaksanakan	132 Kali
		- Jumlah Penanganan Unjuk Rasa dan kerusuhan Massa yang dilaksanakan	10 kali
3)	terlaksananya koordinasi penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat tingkat kabupaten/kota	- Jumlah rapat Koordinasi penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum tingkat kabupaten dan tingkat kecamatan yang dilaksanakan	22 kali
4)		- jumlah anggota Satlinmas yang dikukuhkan	128 Orang
		- Jumlah Anggota Satlinmas yang mengikuti pelatihan	128 Orang
		- Jumlah Kegiatan pembrdayaan Satlinmas yang dilaksanakan	2 kegiatan
		- Jumlah minitoring dan evaluasi satlinmas yang dilaksanakan	4 Kali
		- jumlah pelibatan(mobilisasi)Satlinmas dalam kegiatan penanggulangan bencana	12 Kali

PROGRAM

ANGGARAN

KETERANGAN

Peningkatan ketenteraman dan Ketertiban Umum

Rp 5.701.912.500

APBD

KEGIATAN

- 1) Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah

Rp 5.701.912.500

APBD

SUB KEGIATAN

- 1) Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan cegah dini,
- 2) Penindakan atas gangguan ketenteraman dan ketertiban umum berdasarkan perda dan perkara

Rp 5.526.849.200

APBD

Rp 75.033.300

APBD

- 3) Koordinasi Penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat
- 4) Pemberdayaan perlindungan masyarakat dalam rangka ketenteraman dan ketertiban umum

Rp	50.040.000
Rp	49.990.000

APBD
APBD

Malili, 3 Januari 2022

**KEPALA BIDANG KETENTERAMAN, KETERTIBAN
UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT**

IBRAHIM YAKUB, S.Hut.
Pangkat: Penata
NIP. 19830915 200502 1 001

INDRA FAWZY, S.IP., M.Si.
Pangkat: Pembina Utama Muda
NIP. 19701103 199003 1 002